

Analisis Hubungan Kerjasama Bilateral Australia dan Fiji dalam Bidang Keamanan Periode 2014-2019

Siti Dhea Meutia Syarif

Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Dheasyrf10@gmail.com

ABSTRACT

This research will try to analyze the bilateral relations between Australia and Fiji in the security sector for the 2014-2019 period. In this study, the researcher will explain the background of Australia and Fiji's cooperation in the field of security. In addition, the researcher also explained the dynamics that occurred in the relations between the two countries and the challenges of their relationship in the future. This study uses foreign policy theory with the concept of national importance to understand the reasons Australia and Fiji work together in the security sector.

Keywords: *bilateral, security, national interest*

ABSTRAK

Penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis hubungan kerjasama bilateral Australia dan Fiji dalam bidang keamanan periode 2014-2019. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang kerjasama Australia dan Fiji dalam bidang keamanan. Selain itu, peneliti juga memaparkan tentang dinamika yang terjadi dalam hubungan kedua negara dan tantangan yang akan dihadapi keduanya di masa depan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dengan konsep kepentingan nasional untuk memahami alasan Australia dan Fiji bekerja sama dalam bidang keamanan.

Kata Kunci: *bilateral, keamanan, kepentingan nasional*

1. PENDAHULUAN

Australia dan Fiji merupakan dua negara yang memiliki keinginan yang sama untuk terlibat dalam bidang keamanan, terutama dalam hal *peacekeeping* (pemeliharaan perdamaian). Hubungan Australia sebagai negara '*middle power*' dan Fiji sebagai negara '*small developing country*' memiliki dinamika tersendiri yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang hubungan di antara keduanya terkait bidang keamanan pasca kudeta yakni periode 2014-2019 dengan menggunakan konsep kepentingan nasional (McDougall, 2017).

Keterasingan Fiji dari kawasan Pasifik sejak kudeta tahun 2006 telah mendorong Fiji untuk mengejar hubungan dengan kekuatan negara lain, meningkatkan ekonominya, serta mempromosikan pengaturan sub-regional. Penangguhan Fiji dari organisasi regional di Pasifik serta pelarangan Fiji untuk terlibat dalam operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah meningkatkan perselisihan antara Bainimarama sebagai Perdana Menteri Fiji dengan Australia dan Selandia Baru karena dianggap telah membujuk negara-negara kepulauan Pasifik lainnya untuk mendukung langkah tersebut (Lawson, 2015).

Pada awalnya Fiji tidak memasukkan Australia sebagai salah satu negara yang ia kejar untuk meningkatkan hubungan bilateral maupun dalam ruang lingkup regional. Hal tersebut Fiji lakukan guna mengurangi peran Australia dalam mendominasi kawasan regional tentang masalah keamanan. Misalnya, Fiji telah meminta bantuan militer dari Cina, Rusia, Uni Emirat Arab, dan Israel karena penangguhan kerja sama pertahanan dengan Australia. Pemerintah Fiji telah menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama militer dengan China,

Rusia, dan Uni Emirat Arab, dan telah mendekati Brazil tentang pengaturan serupa (Cramer, 2015).

Namun seiring dengan perkembangannya, Australia sedang membangun kembali hubungan kerjasama pertahanan dengan Fiji setelah pemilihan demokratis negara bagian pada 17 September 2014 lalu. Menjelang pemilihan, Australia memastikan bahwa Fiji menerima intelijen Australia dan kerja sama lainnya selama upaya internasional untuk menjamin pembebasan 44 warga Fiji yang ditangkap di Dataran Tinggi Golan (Security, 2020).

Australia memiliki hubungan yang cukup menantang dengan Fiji dalam hal partisipasi mereka dalam pemeliharaan perdamaian PBB. Dinamikanya mulai terlihat kembali pada 2014 menjelang pemilu, Australia dan Fiji menghasilkan pemulihan hubungan antar negara, serta upaya untuk perlahan membangun kembali hubungan pertahanan bilateral. Australia perlahan-lahan meningkatkan dukungannya ke Fiji dalam hal pemeliharaan perdamaian. Sampai pada 2019, Australia dan Fiji berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral mereka melalui Kemitraan Vuvale Fiji-Australia.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam menganalisis hubungan kerjasama bilateral Australia dan Fiji dalam Bidang Keamanan Periode 2014-2019, penulis akan menggunakan teori kebijakan luar negeri dengan konsep kepentingan nasional. Menurut James Rosenau, kebijakan luar negeri adalah setidaknya semua kebijakan yang memiliki dampak terhadap relasi antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara yang lainnya (Rosenau, 1961). Analisis kebijakan luar negeri merupakan teka-teki yang sulit dipecahkan, kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara tentu memiliki maksud-maksud tertentu yang berorientasi kepada kepentingan nasional dari negara tersebut. Analisis kebijakan luar negeri dengan demikian dapat mengambil sudut pandang dalam penyelesaian masalah yang dihadapi serta menambah elemen-elemen yang berorientasi kepada tujuan negara tersebut (Holsti, 1990).

Kebijakan luar negeri adalah suatu sistem yang dibangun oleh negara untuk mengubah perilaku negara lain serta menyesuaikan kegiatan mereka sendiri dengan apa yang terjadi pada lingkungan internasional. Perilaku negara pada hal ini memiliki dampak baik maupun buruk terhadap negara lain, bahwa meminimalkan tindakan yang merugikan dan memaksimalkan tindakan yang menguntungkan dari negara asing adalah poin utama dari kebijakan luar negeri. Dengan demikian, perihal kebijakan luar negeri pada dasarnya adalah cara bagaimana suatu negara dalam menyesuaikan tindakan negara lain (Modelski, 1962).

Tujuan dari kegiatan kebijakan luar negeri telah menjadi subjek penelitian yang sangat komprehensif serta dikonseptualisasikan dalam banyak cara. Berbicara tentang tujuan jangka panjang kita akan bertemu dengan istilah perdamaian, keamanan, kekuasaan dan kemakmuran dari sebuah negara. Juga, kita bisa membedakan tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari kegiatan menganalisis kebijakan luar negeri ini (Rosenau, 1961).

Di dalam kerangka kebijakan luar negeri terdapat sebuah konsep yang dinamakan kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan serangkaian prioritas suatu negara mengenai tindakan yang akan dilakukan negara tersebut terhadap hubungannya dengan negara-negara lain. Kepentingan tersebut dapat berupa hal-hal yang menjadi penting dalam kondisi internal negara tersebut, contohnya seperti hak asasi manusia, militer, ekonomi, dan sebagainya. Atas dasar hal itu, kepentingan nasional menentukan tindakan politik suatu negara yang akan menjadi salah satu pilar utama dalam hubungan internasional. Tidak ada standar yang dapat menentukan bahwa hal tersebut merupakan sebuah kepentingan nasional karena setiap negara memiliki bias dan kepentingan nasionalnya masing-masing (Nye, 1999).

3. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis rumusan masalah yang telah diambil oleh penulis, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang dijelaskan secara deskriptif menggunakan kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2000). Penelitian ini bersifat deskriptif karena menjelaskan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi dan mengidentifikasi mengapa hal tersebut bisa terjadi dengan cara menginterpretasikan informasi yang ada secara mendalam.

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan studi literatur. Studi Literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah informasi dari buku-buku akademik, jurnal, *website* yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian sebagai bahan rujukan, memperoleh data teoritis, serta mendukung kebenaran data penelitian (Danial & Warsiah, 2009). Penulis akan mencoba menjelaskan tindakan Australia dalam menjalin hubungan kerjasama bilateral di bidang keamanan dengan Fiji. Kemudian, penulis akan mencoba menganalisis dan menjawab hal tersebut berdasarkan fenomena-fenomena dan data yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kerjasama Fiji dan Australia dalam Bidang Keamanan

Fiji telah mengalami kudeta sebanyak empat kali, yakni pada 1987, 2000, 2002, dan 2006. Tiga diantaranya merupakan akibat konflik etnis antara Etnis Fiji asli (Melanesia) yang beragama Kristen Methodis dengan Etnis India yang beragama Hindu (BBC, 2006). Hal tersebut telah memusatkan perhatian pada respons kebijakan luar negeri Australia terhadap negara-negara yang rawan kudeta regional. Dalam kudeta Fiji keempat, pada 5 Desember 2006, terjadi kudeta militer di mana Pasukan Militer Republik Fiji (RFMF) menggulingkan pemerintahan konstitusional Laisenia Qarase, yang telah memenangkan pemilihan demokratis kedua hanya tujuh bulan sebelumnya. Kudeta tersebut juga dinilai banyak melanggar nilai-nilai demokrasi. Selain itu, kudeta militer tersebut juga dilakukan sebagai upaya lembaga militer Fiji yang berusaha mengambil alih pemerintahan dan menjalankan pemerintahan di bawah aturan militer yang dipimpin oleh Frank Bainimarama.

Reaksi resmi Australia untuk Fiji dalam hal ini yakni berupa kecaman politik, pengenaan sanksi, dan imbauan kepada warga Fiji untuk menentang pemerintah militer. Karena hal itulah Australia mulai mempertimbangkan hubungan bilateral Australia dengan rezim kudeta dan militer itu terutama dalam bidang keamanan. Australia menganggap masalah di Fiji berpotensi membahayakan keamanan nasionalnya sendiri, sehingga Australia memprakarsai keterlibatan yang semakin intensif dengan kawasan Melanesia tersebut. Dengan memperluas program bantuannya dan memulai keterlibatan militer yang lebih pro-aktif, Australia bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam masalah keamanan dan pembangunan di Melanesia terutama pada negara yang rawan konflik seperti Fiji, dan pada dasarnya, meningkatkan sasaran kebijakan keamanannya sendiri. Selain itu, upaya pemerintah Australia dalam membantu Fiji dilakukan untuk menghindari terjadinya efek negatif yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Lebih lanjut, Australia juga telah banyak memberikan bantuan pertahanan kepada Fiji karena Australia juga menginginkan peningkatan stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

Australia juga telah bekerja dengan negara-negara Pasifik dalam menyusun komitmen regional terhadap demokrasi dalam bentuk Deklarasi Biketawa, di mana negara-negara tersebut (termasuk Fiji) berkomitmen pada tata pemerintahan yang baik, kebebasan dari individu di bawah hukum dan persamaan hak untuk semua warga negara. Deklarasi Biketawa

merupakan implementasi kerangka kerjasama pertama yang menetapkan serangkaian prosedur yang harus diambil oleh kawasan pasifik jika terjadi krisis politik di negara anggota, tetapi lingkungannya terbatas sebagai mekanisme keamanan regional.

2. Dinamika Hubungan Australia dan Fiji 2014-2019

Perdana Menteri Australia Scott Morrison membuat pengumuman bahwa pasukan penjaga perdamaian Australia akan bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian Fiji dalam penempatan bersama di Dataran Tinggi Golan, Suriah, sebagai bagian dari Pasukan Pengamat Pengunduran Diri PBB (UNDOF) (Clarke, 2019). Pada Oktober 2019 lalu, Perdana Menteri Morrison mengungkapkan bahwa Australia akan bekerja sama untuk misi pemeliharaan perdamaian di Dataran Tinggi Golan dengan Fiji. Pasukan Pengamat Pengunduran Diri PBB (UNDOF) di Golan telah ada sejak 1974 untuk memantau dan mengawasi perjanjian gencatan senjata antara pasukan Israel dan Suriah. Hingga saat ini, pasukan Fiji dan Australia termasuk kontributor terbesar dalam misi tersebut (Peacekeeping, 2020).

Australia saat ini memiliki personel Pasukan Pertahanan Australia (ADF) yang dikerahkan ke tiga misi penjaga perdamaian PBB lainnya - Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS), Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB (UNTSO) dan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Siprus (UNFICYP). Dalam konteks Timur Tengah, Australia memiliki pengamat militer yang ditempatkan di UNTSO sejak 1956 dan saat ini memiliki 12 personel ADF yang dikerahkan untuk misi tersebut. UNTSO secara teratur menyediakan personel untuk mendukung *Observer Group Golan* di UNDOF. Selain operasi penjaga perdamaian PBB, Australia juga terus mempertahankan penyebaran ke Pasukan Multinasional & Pengamat di Sinai (MFO). Kerjasama antara Australia dengan Fiji dalam hal ini merupakan sebuah perkembangan baru dan menandai adanya pergeseran dalam kerja sama pertahanan yang kuat.

Di sisi yang lain, Fiji telah menyumbangkan personel untuk pemeliharaan perdamaian PBB sejak 1978 (Qarase, 2004). Saat ini memiliki personel militer dan polisi dikerahkan untuk operasi penjaga perdamaian PBB di Timur Tengah (termasuk Irak, Libanon, Yaman dan Golan), serta Sudan Selatan dan Darfur. Fiji juga telah menunjukkan kesediaan untuk tetap ditempatkan di misi PBB yang menghadapi risiko keamanan yang signifikan. Misalnya, pada tahun 2014 lebih dari 44 penjaga perdamaian Fiji diculik di Golan oleh aliansi Al-Qaeda. 44 warga Fiji tersebut berpartisipasi dalam Pasukan Pengamat Pengunduran Diri PBB (Charbonneau & Ohayon, 2014).

Selain itu, Wakil Laksamana Ray Griggs, wakil ketua *Australian Defence Force* (ADF), mengunjungi Fiji pada 9 Desember 2014 lalu, mengadakan pembicaraan dengan Timoci Natuva, Menteri Pertahanan Fiji, Keamanan Nasional dan Imigrasi. Hal tersebut merupakan kunjungan perwira senior pertama Australia ke Fiji sejak 2006 (AAP, 2020). Kunjungan ini merupakan langkah penting untuk membangun kembali hubungan pertahanan substantif antara Australia dan Fiji, dan akan membentuk dasar kemitraan baru antara Angkatan Pertahanan Australia (ADF) dan Pasukan Militer Republik Fiji (RFMF). Ray juga melihat bahwa banyak yang akan dapat dicapai oleh dua militer tersebut, termasuk di bidang keamanan maritim, penjaga perdamaian, teknik dan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana (Defence A. G., *Australia enhances defence relationship with Fiji*, 2014).

Pada 2017, kapal patroli Angkatan Laut Australia, *HMAS Wollongong*, telah menyelesaikan kunjungan resmi ke Fiji, termasuk latihan empat hari di Zona Ekonomi Eksklusif Fiji dengan Kapal Angkatan Laut Republik Fiji, Kula. Australia bekerja sama dengan Fiji untuk melakukan perbaikan sekitar AUD \$ 13,5 juta dari dua dari tiga Kapal Patroli Pasifik Australia yang berbakat dari Australia menjelang penyediaan dua kapal pengganti yang akan dibangun di

Australia di bawah Program Keamanan Maritim Pasifik (Defence A. G., Australia and Fiji Navies on exercise, 2017).

Australia telah memberi Fiji *Bushmasters* (kendaraan infanteri buatan Australia) dan memberikan angkutan udara strategis ke Pasukan Militer Republik Fiji (RFMF) untuk mendukung penyebaran mereka ke *Multinational Force and Observers* (MFO) di Sinai (Wyeth, 2019). Fiji akan menggunakan kendaraan tersebut untuk membentuk perlindungan pasukan yang melindungi Pengamat PBB di Dataran Tinggi Golan dan Suriah, yang mencakup personil Angkatan Pertahanan Australia.

Fiji dan Australia juga bekerja sama dalam pembangunan kembali Blackrock Camp pada tahun 2019 di Nadi dan desain Pusat Layanan Esensi Maritim Fiji yang baru, yang akan menggabungkan Markas Besar Angkatan Laut Republik Fiji, Pusat Koordinasi Pengawasan dan Penyelamatan Maritim Fiji, Radio Pesisir dan Layanan Hidrografi Angkatan Laut Fiji. Menurut Hon Alex Hawke MP sebagai Asisten Menteri Pertahanan Australia Blackrock Camp adalah kunci kemajuan militer Fiji.

“Proyek pembangunan kembali Blackrock Camp adalah kunci bagi kelanjutan kemajuan pasukan keamanan dan militer Fiji ketika mereka bersiap untuk tugas kepolisian, latihan penjaga perdamaian dan penyebaran,” (Defence A. G., 2019).

Kerjasama Fiji dan Australia dalam bidang keamanan yang terakhir dapat terlihat dari pembuatan Kemitraan Vuvale Fiji-Australia yang dibangun pada September 2019 lalu. Kemitraan Vuvale Fiji-Australia merupakan sebuah perjanjian antara Australia dan Fiji yang terdiri dalam berbagai bidang, salah satunya dalam hal keamanan dan penjagaan perdamaian. Perjanjian tersebut mengikat Australia dan Fiji untuk masuk ke dalam kemitraan pemeliharaan perdamaian dan untuk mendukung "Gabungan Pasukan Pertahanan Australia - Republik Pasukan Militer Fiji" pada misi penjaga perdamaian, kegiatan pelatihan lebih lanjut dan kerja sama intelijen. Hal tersebut dibangun di atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara Fiji dan Australia pada April 2019 untuk mengembangkan Blackrock Camp sebagai pusat regional untuk pelatihan polisi dan penjaga perdamaian (Department of Foreign Affairs and Trade, 2019).

Peacekeeping Co-deployment yang dilakukan Australia terhadap Fiji dapat memunculkan potensi '*win-win solution*' serta penguatan dalam hubungan bilateral diantara keduanya. Hal tersebut dapat menyediakan sarana bagi Australia dan Fiji untuk menunjukkan komitmen gabungan mereka terhadap sistem multilateral. Australia juga memiliki minat untuk memastikan bahwa Fiji berada dalam posisi untuk mempertahankan komitmennya saat ini terhadap pemeliharaan perdamaian PBB. Dengan menjadikan pemeliharaan perdamaian sebagai pusat kebijakan luar negeri, pemerintah Fiji tanpa disadari telah meningkatkan kemampuan militer untuk campur tangan dalam politik dalam negeri.

Secara tidak langsung, keterlibatan pertahanan Australia dengan Fiji mendukung peningkatan pengaruh Pemerintah Morrison di Pasifik. Maka dari itu, Australia menjadi lebih waspada pada tingkat keterlibatan Fiji di kawasan tersebut, serta dari negara-negara seperti Cina dan Rusia. Rusia sebelumnya telah terlibat dengan Fiji untuk mendukung penyebaran pasukan penjaga perdamaianya, termasuk menyediakan peralatan untuk mendukung penempatan pasukannya di Dataran Tinggi Golan. China juga telah terlibat dengan Fiji untuk mendukung upaya pemeliharaan perdamaianya, dengan penyediaan dana dan personil RFMF yang menerima pelatihan di China. Keputusan Australia untuk bekerja sama dengan Fiji merupakan akibat dari dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan tersebut. Selain itu, keduanya memiliki kesamaan untuk mengatasi *common security* dan ingin meningkatkan peluang bersama dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik baik di negaranya sendiri maupun di regional.

3. Kerjasama Bilateral Australia dan Fiji dalam Bidang Keamanan

Dalam menjelaskan hubungan bilateral antara Australia dengan Fiji, maka konteksnya tidak akan terlepas dari kata kerjasama. Dalam kerjasama tentu didukung oleh aktor-aktor yang menjalankan kerjasama dan kepentingan seperti apa yang ingin dicapai. Dalam hal ini aktor dapat berupa negara ke negara, negara ke organisasi pemerintah, maupun negara ke organisasi non-pemerintah. Menurut Kusumohamidjojo tentang hubungan bilateral adalah:

“Suatu bentuk kerjasama diantara negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun jauh disebrang lautan dengan sasaran utama menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi” (Kusumohamidjojo, 1987).

Hubungan bilateral dapat dilihat dari kondisi diplomatik yang terjalin antar kedua negara. Meskipun mengalami pasang surut, hubungan antara Australia dan Fiji telah berlangsung cukup lama. Karena hubungan keduanya cukup lama, maka secara tidak langsung terjadi suatu dinamika yang memiliki keterkaitan antara kedua negara akibat adanya kepentingan nasional dari masing-masing pihak. Kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi *partner* dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya dari dalam karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama.

Menurut Didi Krisna, hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling memengaruhi atau adanya hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak atau di dalam kedua negara. Keuntungan timbal balik yang demikian jika hasil positif lebih didominasi maka akan terjadi tindakan yang saling ketergantungan (interdependensi) yang akan mengakibatkan kerjasama berlangsung dalam kurun waktu yang lama (Krisna, 1993). Hubungan antara Fiji dan Australia telah terjalin cukup lama, maka secara tidak langsung terjadi suatu dinamika yang memiliki keterkaitan antara kedua negara akibat adanya kepentingan nasional dari masing-masing pihak. Seperti halnya dalam kerjasama yang terjalin cukup lama dapat memudahkan kedua belah pihak untuk memulai kerjasama di bidang yang lain.

Hal tersebut selaras dengan konsep kepentingan nasional oleh Hans J. Morgenthau, dalam tulisannya ia mengatakan bahwa:

“Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik” (Morgenthau, 2005).

4. Kepentingan Nasional Australia dan Fiji

Di mulai ketika Pemerintah Australia menanggapi Kudeta Fiji pada 2006 lalu, dari cara-cara yang dapat ditempuh antara lain dengan intervensi militer langsung untuk memulihkan pemerintah terpilih, pengenaan sanksi ekonomi penuh, perdagangan dan olahraga, maupun pembekuan aset warga negara Fiji atau pembatasan bisnis dan pariwisata. Australia memilih untuk membujuk pemerintah Fiji untuk mengadakan pemilihan ulang, namun Australia gagal dalam memberikan pengaruh diplomatiknya terhadap pemerintah Fiji. Hal tersebut membuat reputasi Australia di Kawasan Pasifik Selatan dan internasional menurun. Terlebih, pada waktu yang sama Australia sedang berupaya untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) (Hayward-Jones, 2011).

Selain itu, pengucilan Australia atas Fiji telah merusak hubungan regionalnya dengan Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu (Herr, 2010). Vakumnya kerjasama antara Australia dengan negara-negara tersebut telah memberikan China kesempatan untuk masuk dan mengeksploitasi pulau-pulau yang ada dalam kawasan tersebut. Maka atas dasar hal tersebut, Australia ingin melindungi kepentingan nasionalnya yakni dengan cara memulihkan hubungan bilateralnya dengan Fiji dan turut aktif dalam menjaga keamanan yang ada di Kawasan Pasifik.

Di sisi lain, dampak dari kudeta Fiji telah dirasakan oleh negara itu sendiri di mana Fiji mengalami keruntuhan ekonomi yang dapat memicu ketidakstabilan politik di negaranya. Hilangnya kerjasama pertahanan dengan mitra-mitra utama juga telah melemahkan kemampuan Fiji untuk menangani masalah kejahatan transnasional dan memberikan keamanan perbatasannya. Sebagai konsekuensi langsung dari kudeta militer, kerja sama pertahanan dan bantuan dari Australia, Selandia Baru, Prancis, dan Amerika Serikat telah berhenti. Ketika Fiji pulih dari kudeta militer, Fiji mengkhawatirkan akan adanya ancaman eksternal yang dapat mengganggu keamanan wilayahnya. Terlebih, Fiji telah dikucilkan dalam forum regional seperti Forum Kepulauan Pasifik (PIF). Demi menjaga keamanan wilayah sebagai kepentingan nasionalnya, Fiji berusaha kembali terbuka dengan dunia internasional yang ingin membantu Fiji agar dapat pulih akibat kudeta militer yang terjadi (Tatre, 2010).

Australia dan Fiji memiliki tujuan yang sama untuk melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing, yakni untuk menjaga keamanan kawasan. Alasan mengapa kedua negara tersebut memutuskan untuk bekerja sama dalam bidang keamanan dapat terlihat dari beberapa faktor. Pertama, Fiji merupakan negara yang memiliki basis militer kuat meskipun kecil di Pasifik Selatan. RFBF merupakan garda terdepan Fiji yang memiliki kontribusi besar, seperti membangun pembangunan nasional, menjaga keamanan maritim, serta berpartisipasi dalam penjaga perdamaian internasional. Kedua, Australia telah memiliki banyak pengalaman dalam keamanan terutama dalam hal operasi penjagaan perdamaian bersama PBB (Bellamy, 2012). Dalam hal ini kedua negara masing-masing mendapatkan keuntungan, di mana Fiji dapat bantuan dari Australia berupa diberikannya alat-alat militer dan membantu Fiji untuk menjaga keamanan wilayahnya dari ancaman eksternal dan Australia dibantu oleh pasukan Fiji dalam menjaga misi perdamaian di dunia, serta menjaga pengaruh Australia di Kawasan Pasifik dan mengembalikan kepercayaan negara-negara lain terhadap Australia dalam upayanya membantu Fiji adalah sebagai bentuk solidaritas negara-negara Pasifik dan atas dasar bantuan kemanusiaan (Tatre, 2010).

5. Tantangan Hubungan Bilateral Australia dan Fiji di Masa Depan

Hubungan bilateral yang terjalin antara Australia dan Fiji dapat dilihat sebagai perkembangan yang positif dalam ruang lingkup keamanan nasional, namun terdapat pula tantangan yang melekat bahwa situasi politik di Fiji akan melahirkan tantangan keamanan baru. Ketidakstabilan internal di Fiji telah mempengaruhi operasi organisasi regional di negara tersebut, dan mengganggu perdagangan internasional yang terjadi. Kemudian, ketidakstabilan itu telah merusak kapasitas Fiji untuk melawan ancaman eksternal (khususnya kejahatan transnasional) yang secara langsung dan tidak langsung mengancam tetangga Fiji yang lebih besar seperti Australia dan Selandia Baru.

Konflik politik di Fiji menciptakan tantangan keamanan untuk kawasan Pasifik juga bagi Fiji sendiri. Mengisolasi Fiji dari kerja sama keamanan - sebagai cara untuk menekan pemerintah agar mempercepat pemilihan - belum terbukti berhasil dan pada kenyataannya menimbulkan sejumlah risiko. Ada risiko bahwa Fiji akan semakin bergerak ke arah hubungan pertahanan yang lebih dekat dengan kekuatan yang baru muncul yaitu China, sehingga melemahkan pengaruh mereka sendiri di wilayah tersebut. Ini sudah terjadi ketika

personel RFMF semakin banyak bepergian ke China (atau negara-negara Asia lainnya) untuk pelatihan militer dan pengawasan maritim. Pemerintah Fiji juga telah berkomitmen dalam prinsip *One China Policy* dan akan bekerja sama dalam sektor-sektor lainnya. *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan sebuah strategi pembangunan global China yang melibatkan pengembangan infrastruktur dan investasi terhadap negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika. Menurut Ratu Tui Cavuilati sebagai Duta Besar China untuk Fiji, inisiatif BRI yang dijalankan China merupakan dimensi tambahan untuk memperkuat konektivitas antara Cina dan mitra pembangunannya. Meskipun Fiji belum tergabung ke dalam inisiatif tersebut, namun tidak menutup kemungkinan China akan mengajak Fiji untuk ikut bergabung (Xinhua, 2018).

Selama 10 tahun terakhir, fokus Australia pada Kawasan Pasifik tersebut telah memperkuat tema-tema seperti pendukung demokrasi, pemerintahan yang baik, dan memungkinkan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Brown, 2012). Tetapi di samping itu, telah ada fokus baru dalam menangani risiko negara-negara lemah yang gagal untuk memerintah. Wilayah negara-negara tersebut dapat menciptakan kekosongan kekuasaan di mana teroris atau organisasi kejahatan terorganisir dapat menjadi ancaman keamanan Australia. Hubungan antara Fiji yang semakin dekat dengan China, dapat menantang pengaruh Australia di kawasan tersebut.

Posisi geografis pulau-pulau Pasifik yang terletak antara Asia dan Amerika Selatan berpotensi menjadikan mereka tempat yang menarik untuk mentransportasikan obat-obatan terlarang, penyelundupan manusia dan senjata terlarang. Tantangan yang akan dihadapi Australia dan Fiji mungkin akan bergeser dari penjagaan perdamaian menjadi keamanan terhadap kejahatan transnasional di wilayah mereka. Hubungan bilateral keduanya akan lebih mengarah untuk membentuk struktur regional dan memperkuat kerja sama. Selain itu, besarnya pengaruh China di wilayah tersebut berpotensi menggagalkan upaya Australia untuk memberikan bantuan kepada Fiji dan proses pengembalian pemerintah yang terpilih secara demokratis (Brown, 2012).

5. KESIMPULAN

Hubungan kerjasama bilateral antara Australia dan Fiji pada tahun 2014-2019 dalam bidang keamanan mengalami dinamika yang unik. Sejak kudeta militer Fiji yang terakhir, Australia banyak membantu Fiji dan melakukan kerjasama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Hubungan kerjasama tersebut dapat terlihat dari bergabungnya kedua negara dalam misi diplomatik di Dataran Tinggi Golan, Australia memberikan *Bushmaster* kepada Fiji untuk memperkuat militernya, pembangunan kembali Blackrock Camp, serta pembuatan Kemitraan Vuvale Fiji-Australia. Keduanya menjalin kerjasama karena memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Australia ingin memperkuat pengaruhnya di kawasan Pasifik melalui Fiji, di sisi yang lain Fiji ingin mendapatkan keamanan dari negara yang lebih besar untuk melindungi negaranya dari ancaman eksternal. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hubungan kedua negara mengalami pergeseran karena besarnya pengaruh China di kawasan tersebut sehingga kepentingan Australia juga semakin sulit tercapai. Kejahatan transnasional merupakan tantangan yang akan mereka hadapi di masa depan akibat dari posisi wilayah mereka yang strategis. Keduanya memiliki *common security* yang sama, sehingga kemungkinan kedua negara ini akan tetap menjalin hubungan kerjasama bilateral dalam bidang keamanan untuk mempertahankan wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

AAP. (2020, March 16). *Aust, Fiji Move to Resume Defence Ties*. Diambil kembali dari news.com.au: <https://www.news.com.au/national/breaking-news/aust-fiji-move-to-resume-defence-ties/news-story/a85d9fec41f46aa3cf74bc3c4da92b01>

- BBC. (2006, December 8). *Background to Fiji's four coups*. Diambil kembali dari BBC News: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6209486.stm>
- Bellamy, P. A. (2012, September). *Peacekeeping Contributor Profile: Australia*. Diambil kembali dari Providing for Peacekeeping: <http://www.providingforpeacekeeping.org/2014/04/03/contributor-profile-australia/>
- Brown, C. P. (2012). Australian Influence in the South Pacific. *ADF Journal*, 66-78.
- Charbonneau & Ohayon. (2014, August 31). *U.N., Fiji say no word on location of peacekeepers abducted in Golan Heights*. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-peacekeepers-idUSKBN0GV07420140831>
- Clarke, M. (2019, October 12). *Australian, Fijian troops head to the Middle East for joint peacekeeping mission*. Diambil kembali dari ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2019-10-12/australia-fiji-troops-head-to-the-middle-east-for-peacekeeping/11596328>
- Danial & Warsiah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Defence, A. G. (2014, December 9). *Australia enhances defence relationship with Fiji*. Diambil kembali dari Defence News: <https://news.defence.gov.au/media/media-releases/australia-enhances-defence-relationship-fiji>
- Defence, A. G. (2017, June 2). *Australia and Fiji Navies on exercise*. Diambil kembali dari Defence News: <https://news.defence.gov.au/media/media-releases/australia-and-fiji-navies-exercise>
- Defence, A. G. (2019, September 16). *Australia and Fiji commit to defence cooperation*. Diambil kembali dari Departement of Defence Ministers: <https://www.minister.defence.gov.au/minister/lreynolds/media-releases/australia-and-fiji-commit-defence-cooperation>
- Hayward-Jones, J. (2011). Policy Overboard: Australia's Increasingly Costly Fiji Drift. *The Lowry Institute, Sydney*, 3-9.
- Herr, R. (2010). *Time for a Fresh Approach, Australia and Fiji Relations Post-Abrogation*. Canberra: ASPI.
- Holsti, K. J. (1990). *The Political Economy of Foreign Policy in Southeast Asia*. London: Macmillan.
- Krisna, D. (1993). *Hubungan Bilateral dan Politik Internasional*. Jakarta: Gramedia.
- Kusumohamidjojo, B. (1987). *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Bina Cipta.
- Modelski, G. (1962). *A Theory of Foreign Policy*. New York: Center of International Studies.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morgenthau, H. J. (2005). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. McGraw-Hill Education, 7 Edition.
- Nye, J. S. (1999). Redefining the National Interest. *Foreign Affairs, Vol. 78, No. 4*, 23.
- Peacekeeping, U. N. (2020, April 4). *UNDOF Fact Sheet*. Diambil kembali dari United Nations: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/undof>
- Qarase, H. L. (2004). *Address to the 59th Session of the United Nation General Assembly*. Prime Minister of the Republic of the Fiji Islands.
- Rosenau, J. N. (1961). *International Politics and Foreign Policy*. New York: The Free Press of Glencoe.
- Security, G. (2020, March 16). *Fiji Peacekeeping Missions*. Diambil kembali dari GlobalSecurity.org: <https://www.globalsecurity.org/military/world/oceania/fiji-pko.htm>
- Tatre, S. (2010). Fiji Islands Security Challenges And Defense Policy Issues. Dalam S. Tatre, *Asia Pacific Countries Security Outlook and Its Implications for the Defense Sector* (hal. 67-84). Tokyo: The National Institute for Defense Studies.

- Wyeth, G. (2019, October 18). *Peacekeeping and the Evolving Australia-Fiji Relationship*. Diambil kembali dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2019/10/peacekeeping-and-the-evolving-australia-fiji-relationship/>
- Xinhua. (2018, February 9). *Fiji, China enjoy close relations, eye for future cooperation: Fijian official*. Diambil kembali dari Xinhuanet: http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/09/c_136962716.htm
- Department of Foreign Affairs and Trade. (2019). *Fiji-Australia Vuvale Partnership*. <https://dfat.gov.au/geo/fiji/Documents/fiji-australia-vuvale-partnership.pdf>
- Lawson, S. (2015). Fiji's Foreign Relations: Retrospect and Prospect. *Round Table*, 104(2), 209-220. <https://doi.org/10.1080/00358533.2015.1017257>
- McDougall, D. (2017). Peacekeeping from Oceania: Perspectives from Australia, New Zealand and Fiji. *Round Table*, 106(4), 453-466. <https://doi.org/10.1080/00358533.2017.1352151>